



RENCANA STRATEGIS 2018-2023

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, melalui berkat dan perkenaan-NYA, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terselesaikan dengan baik.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu dokumen perencanaan yang di jabarkan selama lima tahun yaitu 2018-2023. Dokumen ini disusun dengan mempedomani Permendagri 86 Tahun 2017 dan Rencana Jangka Menengah (RPJMD) 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan tersusunnya dokumen ini kiranya dapat dijadikan sebagai pedoman dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan selanjutnya serta dokumen evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal.

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2021
Kepala Badan Kesbang dan Politik

INDAH SAID ROEM, SE., M.A.P

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19640610 199307 2002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan	4
I.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	9
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
II.2 Sumber Daya	19
II.3 Kinerja Pelayanan	24
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	30
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	30
III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
III.3 Telaahan Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sulsel	34
III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	37
IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	41
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
BAB VIII PENUTUP	71



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Sidenreng Rappang	23
Tabel II.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang	27
Tabel IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang	38
Tabel V.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	40
Tabel VI.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	57
Tabel VII.1	Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	70



BAB I

PENDAHULUN

I.1 Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salahsatu unsur perangkat daerah yang berbentuk badan yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan kesatuan bangsa dan politik memiliki peran dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi keamanan dan kenyamanan masyarakat yang selalu kondusif. Untuk mencapai semua itu diperlukan perencanaan program dan kegiatan yang strategis sebagai bahan acuan dalam penentuan kebijakan - kebijakan selama lima tahun kedepan.

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Undang-undang ini kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra ini.

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018-2023 Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan dokumen publik yang menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang serta Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang dan adanya



pandemi Covid 19.

Dokumen Renstra disusun guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang, difokuskan pada kegiatan yang sifatnya spesifikasi yang bersinergi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 (ayat 2) dalam Permendagri 86 tahun 2017 menyebutkan bahwa renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- persiapan penyusunan;
- penyusunan rancangan awal;
- penyusunan rancangan
- pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas
- Perangkat Daerah;
- perumusan rancangan akhir; dan
- penetapan.

Dokumen rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 serta memperhatikan Rencana Strategis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Dokumen Renstra ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) pada setiap tahunnya untuk selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

I.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi penyusunan renstra ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran



Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679):

- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 7) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan TugasKepala Daerah/wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah Ibadat;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini



Daerah;

- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
- 14) Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
- 17) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 18) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 36).

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud

Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018 – 2023 disusun dengan maksud:

- 1) Untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.
- 2) Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

I.3.2 Tujuan



Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 s/d 2023 ini yaitu :

- 1) Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang.
- 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang yang memuat program dan kegiatan.
- 3) Meningkatkan kualitas dan efektifitas upaya pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- 4) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang 2018-2023 adalah:

Bab I Pendahuluan, terdiri atas:

- ❖ Latar Belakang, mengemukakan secara ringkas pengertian Perubahan Renstra Perangkat Daerah, fungsi Perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.
- ❖ Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah
- ❖ Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- ❖ Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan



Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, terdiri atas:

- ❖ Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- ❖ Sumber Daya Perangkat Daerah, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- ❖ Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2011 bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

Mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

- ❖ Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. bagian ini



mengemukakan hasil analisis terhadap Perubahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, terdiri atas:

- ❖ Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- ❖ Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.
- ❖ Telaahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Perubahan Renstra K/L ataupun Perubahan Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.
- ❖ Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- ❖ Penentuan Isu-Isu Strategis, pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:
 - a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;



- c. sasaran jangka menengah dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
 - d. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - e. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.
- ❖ Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran, terdiri atas:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Pada bagian ini memuat kesimpulan dan Kaidah pelaksanaan perubahan Renstra Perangkat Daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur penunjang otonomi daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 64 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten sidenreng rappang, maka tugas, fungsi dan struktur organisasi badan kesatuan bangssa dan politik dijabarkan sebagai berikut:

(1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;



- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. merumuskan perencanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan;
- i. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- k. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- l. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- m. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- o. merumuskan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga yang meliputi kelembagaan partai politik dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- p. merumuskan kebijakan dibidang kesatuan bangsa yang meliputi pembauran dan wawasan kebangsaan;



- q. mengoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis operasional untuk pelaksanaan kewenangan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik;
- r. melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik;
- s. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional bidang kesatuan bangsa dan politik;
- t. menerima dan menindak lanjuti informasi serta data dalam lingkup Badan Kesatuan bangsa dan politik ;
- u. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- v. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Badan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.



Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- i. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Badan;
- k. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum,



kepegawaian dan hukum;

- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- t. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Bidang Hubungan Antar Lembaga

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang hubungan antar lembaga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan



hubungan organisasi kemasyarakatan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Hubungan Antar Lembaga sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Hubungan Antar Lembaga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyelenggarakan dan mengoordinasikan serta melaksanakan perumusan teknis operasional sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan dan kelembagaan partai politik serta budaya dan pendidikan politik;
- h. menyelenggarakan dan mengoordinasikan serta melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah dalam Skala Kabupaten;
- i. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat;
- j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan peningkatan kapasitas AparaturKesbangpol dibidang Sistem dan Implementasi Politik,



Kelembagaan Politik Pemerintahan, Kelembagaan Partai Politik, Budaya dan pendidikan Politik, Fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada Skala Kabupaten;

- k. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di bidang sistem dan Implementasi Politik, Kelembagaan Politik Pemerintahan, kelembagaan Partai Politik, Budaya dan pendidikan Politik, Fasilitasi pemilu, Pilpres dan Pilkada Skala Kabupaten;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Bidang Kesatuan Bangsa

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa sebagai pedoman



dalam pelaksanaan tugas;

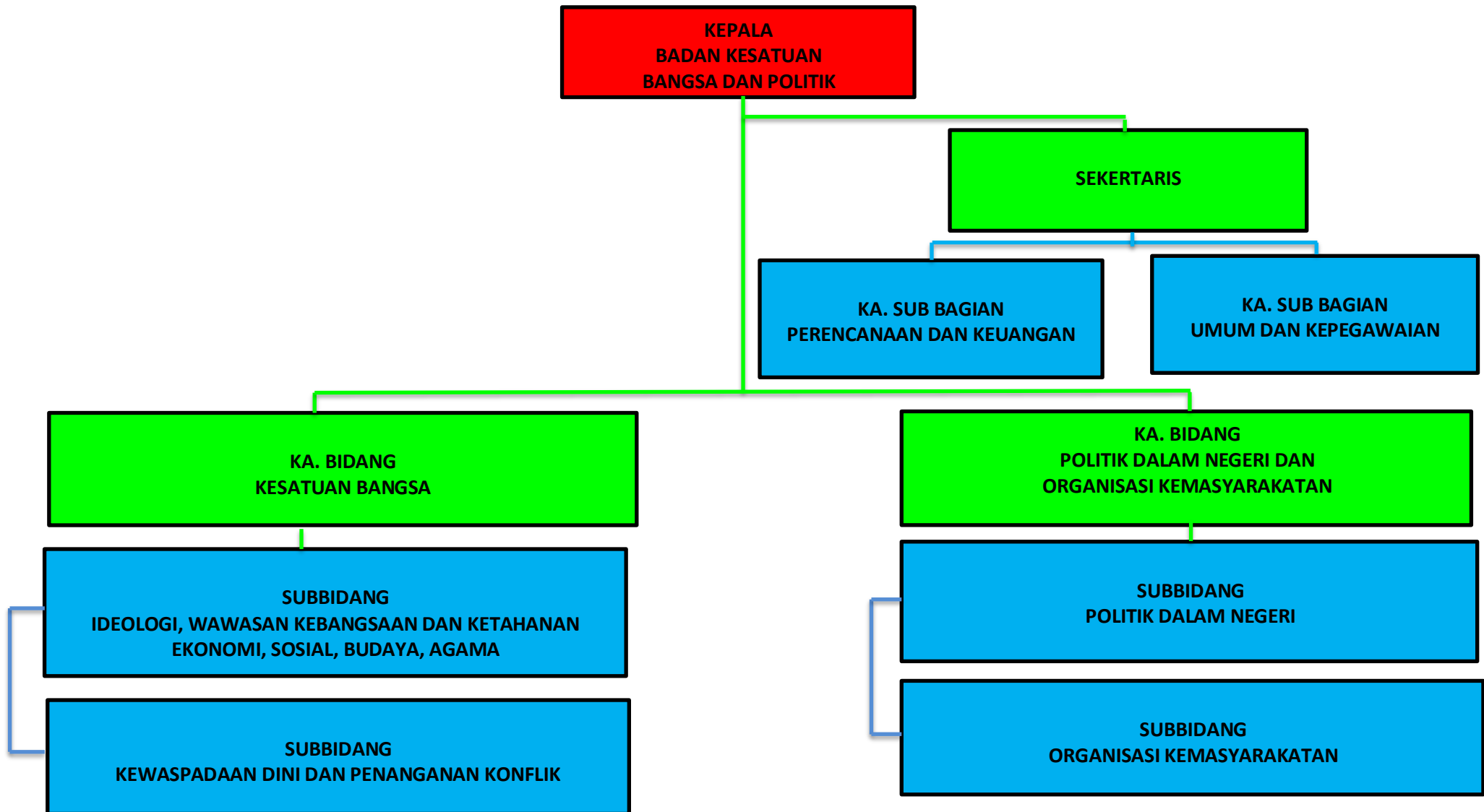
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Ketahanan Idiologi negara, wawasan Kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam skala Kabupaten;
- h. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelkam, Bina Masyarakat, Perbatasan dan Tenaga Kerja, Penanganan Konflik Pemerintahan, Penanganan Konflik Sosial, Pengawasan orang asing dan Lembaga asing skala Kabupaten;
- i. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat dibidang Ketahanan Idiologi negara, wawasan Kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam Skala Kabupaten;
- j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kesbangpol dibidang Ketahanan Idiologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan



penghargaan kebangsaan dalam Skala Kabupaten;

- k. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, kelurahan dan masyarakat dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelkam, Bina Masyarakat perbatasan, Tenaga Kerja, Penanganan Komplik Pemerintahan dan Sosial, Pengawasan Orang Asing dan lembaga Asing skala Kabupaten;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat ditunjukkan dalam struktur berikut:





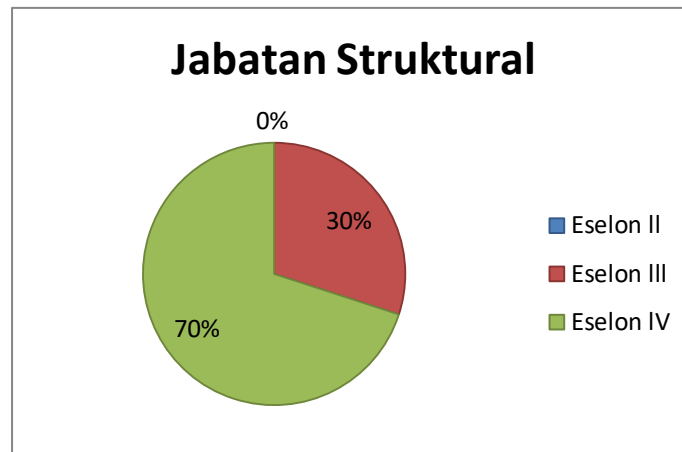
2.2 Sumber Daya

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di dukung oleh sumber daya yang telah ada, diantaranya sebagai berikut:

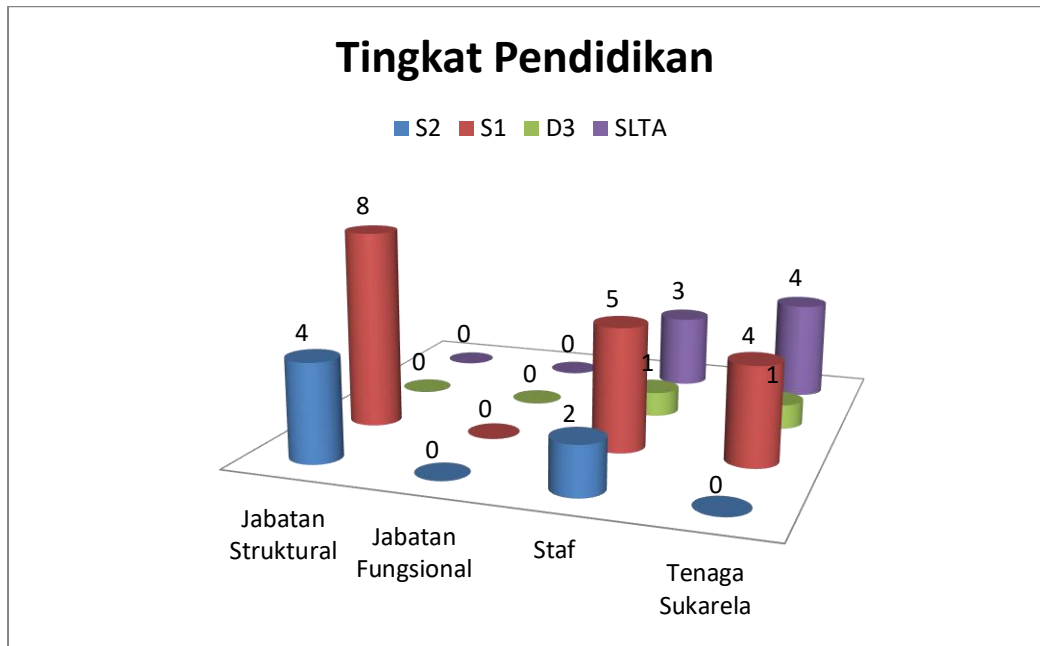
2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, sangat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia/aparatur yang cukup handal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemampuan profesional dalam menunjang tugas.

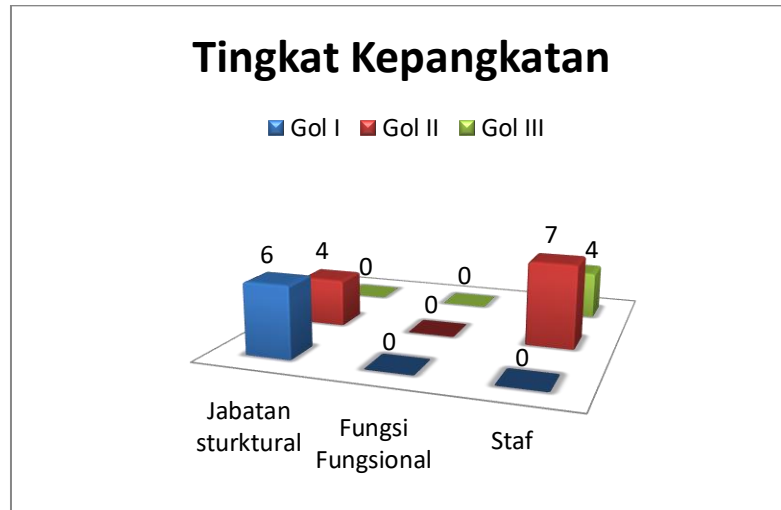
Jumlah dan kualitas personil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat ditunjukkan pada beberapa diagram berikut:



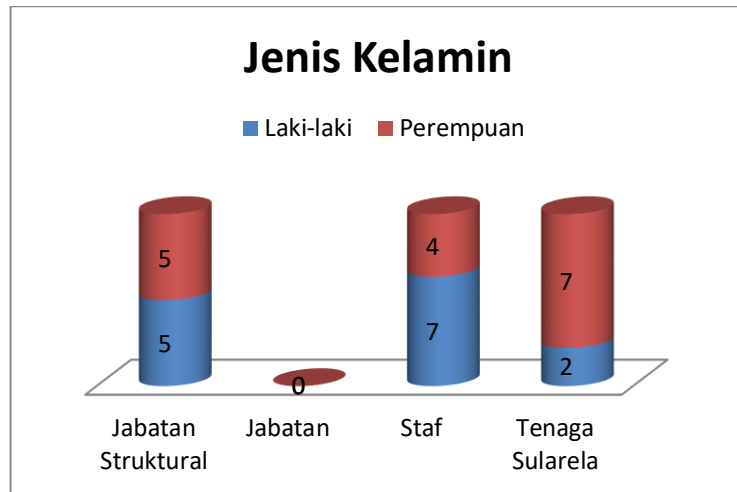
Berdasarkan komposisi jabatan struktural di tahun 2018, Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya terisi pada jabatan Eselon dimana jabatan eselon III sebanyak 3 orang dan eselon IV sebanyak 6 orang. Pada tingkat pendidikan, pejabat struktural terdiri atas S1 sebanyak 6 orang; S2 sebanyak 4 orang. Staf terdiri atas SLTA sebanyak 2 orang; D3 sebanyak 0 orang; S1 sebanyak 8 orang dan S2 sebanyak 1 orang. Tenaga sukarela, SLTA sebanyak 2 orang; D3 sebanyak 0 orang; S1 sebanyak 8 orang. Hal ini dapat di tunjukkan pada diagram di berikut ini:



Berdasarkan Golongan kepangkatan, komposisi pegawai Badan kesbangpol hanya terisi pada Jabatan struktural sebanyak 4 orang pada golongan IV dan 6 orang pada Golongan III, sedangkan untuk staf, terdapat pada golongan III sebanyak 7 orang dan golongan II sebanyak 4 orang.



Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 15 orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang berjenis kelamin perempuan. Adapun rinciannya dapat ditunjukkan pada diagram di bawah:



2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di dukung sejumlah sarana dan prasarana meliputi kendaraan dinas, inventaris/peralatan kantor, dan perlengkapan lainnya.

1) Kendaraan Dinas terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH ASET	KONDISI
1.	Mobil (Kendaraan Dinas)	1 unit	Baik
2.	Mobil (Kendaraan Operasional)	1 unit	Baik
3.	Motor	8 buah	Baik



2) Aset

NO	URAIAN	JUMLAH ASET	KONDISI
1.	AC	8 unit	Baik
2.	Komputer/PC	4 unit	Baik
3.	Printer	3 buah	Baik
4.	Laptop	3 buah	Baik
5.	UPS	1 buah	Baik
6.	Meja Kerja	22 buah	Baik
7.	Meja Rapat	1 buah	Baik
8.	Kursi	50 buah	Baik
9.	Harddisk Eksternal	1 buah	Baik
10.	Scanner	1 buah	Baik
11.	Peralatan Jaringan	1 unit	Baik
12.	Filling Cabinet	5 buah	Baik
13.	Lemari Arsip	4 buah	Baik
14.	TV	2 buah	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2014-2018

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan tugas dan fungsinya dalam urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik telah memberikan pelayanan yang cukup maksimal dengan memprioritaskan program-program yang mendukung sasaran Perubahan Renstra strategis yang tercermin dalam tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 dengan forma sebagai berikut:



Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan/penyuluhan ideologi Pancasila dan karakter bangsa					INDIKATOR BARU										INDIKATOR BARU				
2	Persentase masyarakat dan sumber daya manusia partai politik yang mendapatkan pendidikan politik					0	0	0							0	0	0	0,08	0,08	
3	persentase organisasi masyarakat dan masyarakat yang diberdayakan														INDIKATOR BARU					
4	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya														INDIKATOR BARU					
5	Persentase koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



Berdasarkan tabel diatas, masih banyak terdapat kesenjangan pelayanan pada badan kesatuan bangsa dan politik, hal ini dapat ditunjukkan dengan masih adanya target kinerja pelayanan yang belum tercapai bahkan tidak terlaksana. Target pelayanan tercapai pada beberapa target diantaranya terpenuhinya dokumen laporan intelijen, pendidikan politik bagi masyarakat dan SDM partai politik serta forum/pokja yang memberikan pemahaman wawasan kebangsaan.

Berikut disajikan data angka kriminalitas dan unjuk rasa (aksi damai) di wilayah kab. Sidrap.

ANGKA KRIMINALITAS KAB. SIDENRENG RAPPANG Tahum 2014-2018

NO	JENIS KRIMINAL	T A H U N				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Kasus Narkoba	86	83	111	140	115
2.	Jumlah Kasus Pembunuhan	1	2	5	4	3
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	6	10	16	18	21
4.	Jumlah Kasus Penganiayaan	74	91	91	148	155
5.	Jumlah Kasus Pencurian	33	20	16	41	103
6.	Jumlah Kasus Penipuan	13	22	27	37	60
7.	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	1	0	1	0
Jumlah Tindak Kriminal selama 1 Tahun		213	229	266	389	457

Sumber data: Polres Sidrap

JUMLAH UNJUK RASA (ASPIRASI DAMAI) DI KAB. SIDERENG RAPPANG TAHUN 2014-2018

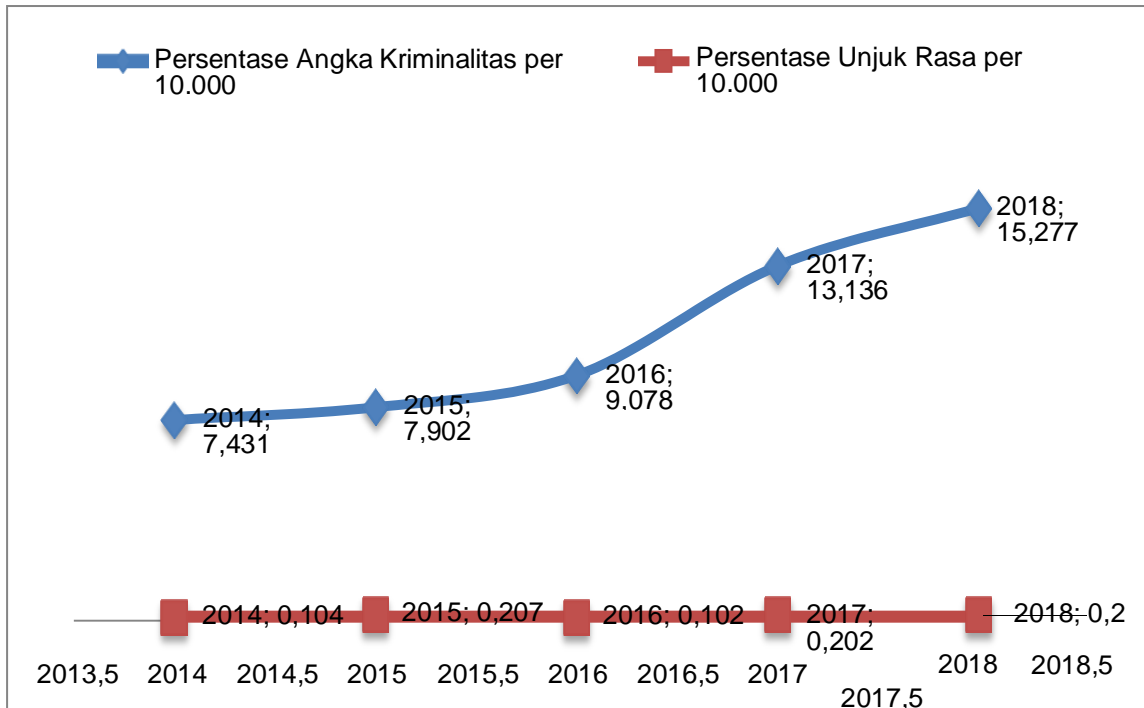
NO	JENIS KRIMINAL	T A H U N				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Bidang Politik	2	3	2	4	4
2.	Ekonomi	1	3	1	2	2
3.	Kasus Pemogokan Kerja	0	0	0	0	0
Jumlah Unjuk Rasa selama 1 Tahun		3	6	3	6	6

Sumber data: Polres Sidrap

data angka kriminalitas selama 5 tahun terakhir memperlihatkan bahwa angka kriminalitas di wilayah Kab. Sidenreng Rappang mengalami peningkatan di tiap

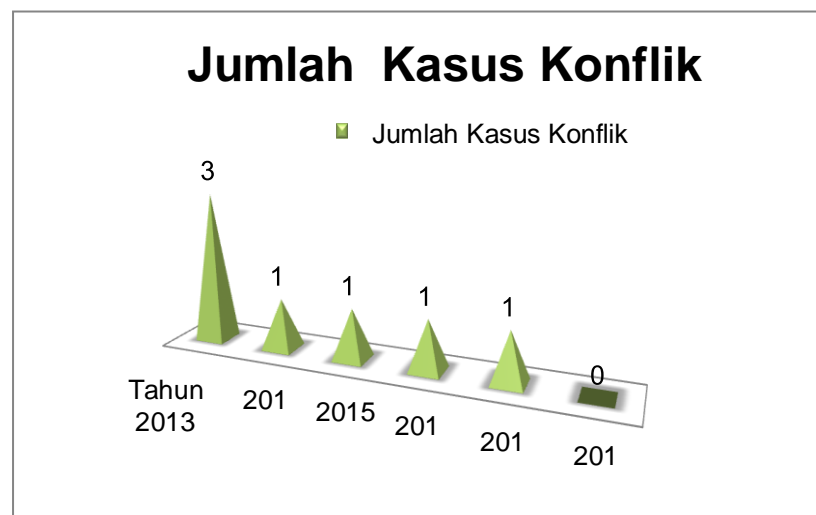


tahunnya sedangkan pada jumlah unjuk rasa tahun 2016 mengalami penurunan tetapi di tahun selanjutnya yaitu tahun 2017- 2018 mengalami peningkatan unjuk



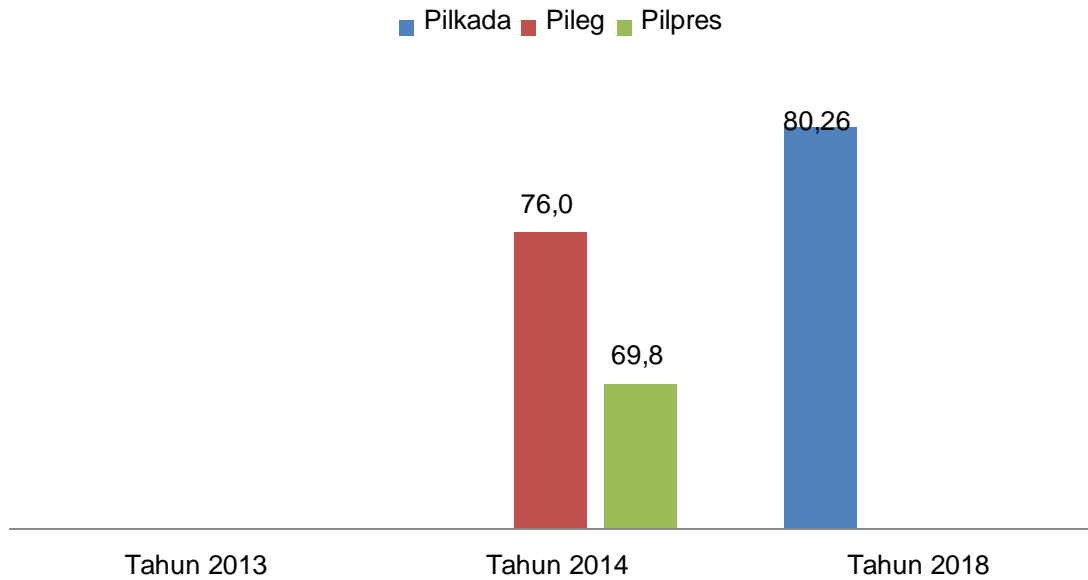
rasa di bidang politik, dimana pada tahun tersebut proses tahapan pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif sedang berjalan.

Meskipun terjadi peningkatan terhadap angka kriminalitas selama lima tahun terakhir, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mengupayakan agar potensi- potensi konflik yang ada dapat segera tertangani sehingga dapat menekan angka konflik pada tiap tahunnya.



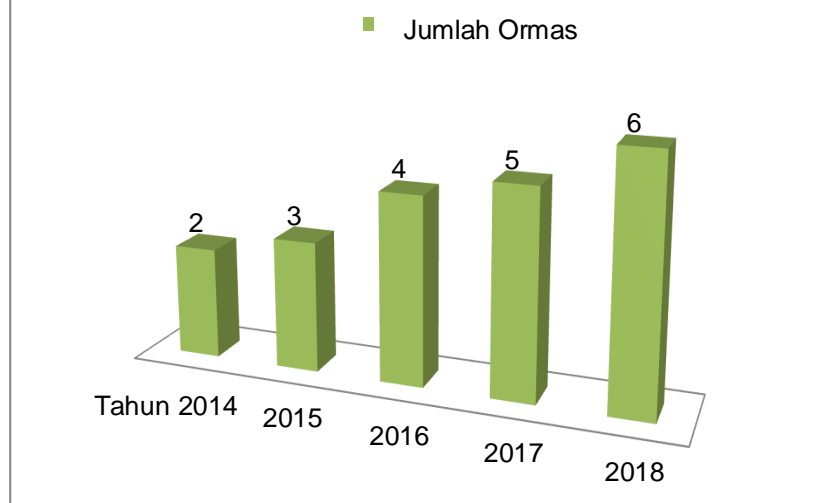


Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu



Tahun 2014, angka partisipasi pemilih dalam pemilu sebesar 76,01 % pada pemilihan legislatif sedangkan pada pemilihan presiden dan wakil presiden hanya mencapai 69,86%. Angka partisipasi pemilih mengalami peningkatan pada pilkada di tahun 2018 yaitu sebesar 80,26%.

Ormas Ber-SKT





Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata - rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	347.782.000	283.459.000	420.390.000	550.157.500	443.085.500	287.635.182	276.065.967	403.657.553	499.536.778	408.044.509	82,71%	97,39%	96,02%	90,80%	92,09%	1,062	1,091
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	145.776.500	41.060.000	148.660.000	81.127.000	62.108.000	93.404.249	40.995.500	141.575.350	52.345.000	35.786.939	64,07%	99,84%	95,23%	64,52%	57,62%	0,807	0,786
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	627.367.500	241.890.000	133.390.000	62.000.000	35.000.000	216.367.300	11.274.700	115.000.000	62.000.000	34.100.000	34,49%	4,66%	86,21%	100%	97,43%	0,486	0,630
Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	336.696.500	170.956.000	234.415.000	816.935.000	296.372.000	330.908.500	170.170.000	234.415.000	808.655.000	251.524.000	98,28%	99,54%	100%	98,99%	84,87%	0,968	0,933
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	69.010.000	13.025.000	57.599.000	288.656.500	102.274.000	27.591.500	12.725.000	29.150.000	266.032.000	78.260.000	39,98%	97,70%	50,61%	92,16%	76,52%	1,103	1,297
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	53.485.000	-	-	262.425.000	240.665.000	9.781.500	-	-	262.425.000	193.707.500	18,29%	0%	0%	100%	80,49%	1,456	2,109
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	196.890.000	70.000.000	-	-	-	188.054.999	68.920.000	-	-	-	95,51%	98,46%	0%	0%	0%	0,355	0,366
Program Pendidikan Politik Masyarakat	-	-	-	311.850.000	319.177.500	-	-	-	307.723.500	301.142.500	0%	0%	0%	98,68%	94,35%	1,023	0,978



Berdasarkan tabel T-C.24 Rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik ditunjukkan pada kegiatan teknis yaitu pada Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dimana rasionya sebesar 84,87% - 100%. Begitu juga dengan 2 program dari kegiatan rutin yang rasionya mencapai kisaran 57,62 – 99,64%.

Adapun rasio pencapaian yang kurang baik terdapat pada beberapa program, yaitu peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan sebesar 4,66 % ditahun 2015, bahkan pada beberapa program seperti program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta program pendidikan politik masyarakat rasionya pencapaiannya adalah 0% di beberapa tahun. Beberapa hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan dikarenakan oleh beberapa faktor-faktor yaitu:

1. Kuantitas dan Kualitas SDM Badan Kesbangpol kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas,
2. Prioritas penganggaran diperuntukkan pada program/kegiatan tertentu guna mendukung tercapai target kinerja pelayanan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Analisis Internal dan Eksternal

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. adapun faktor dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Faktor

Internal

1). Kekuatan

- Adanya Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

2). Kelemahan

- Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas.



- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Data yang tersedia terkait urusan kesatuan bangsa dan politik kurang memadai.

b. Faktor Eksternal

a. Peluang

- Stabilitas daerah yang cukup kondusif.
- Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi.
- Meningkatnya sarana dan prasarana yang ada di masyarakat.

b. Ancaman

- Adanya potensi terjadinya konflik.
- Meningkatnya mobilitas sumber daya manusia.

2.4.2. Faktor-faktor kunci keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen bersama untuk menjaga situasi Kab. Sidenreng Rappang tetap kondusif.
- b. Adanya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia.
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.
- d. Pemanfaatan dana yang tersedia secara maksimal.
- e. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal, terutama dalam rangka memberi bimbingan, petunjuk, perintah maupun pengawasan tugas.
- f. Pemanfaatan dokumen Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang tidak lepas dari permasalahan baik internal maupun eksternal yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas dan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ini merupakan identifikasi permasalahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

1) Permasalahan Internal;

Masalah pokok yang terjadi dalam internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah kurang optimalnya pelayanan administrasi perkantoran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah SDM aparatur pada kantor ini dan juga ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang tidak mencukupi sehingga menambah lambatnya proses pelayanan administrasi.

2) Permasalahan Eksternal;

Isu-isu eksternal yang menjadi tantangan dalam pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat di tunjukkan dalam beberapa aspek, yaitu:

➤ Ideologi

Yang menjadi tantangan dalam aspek ini adalah adanya keinginan beberapa kelompok masyarakat yang ingin mencoba mengganti dasar negara, hal ini cukup mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga perlu kerja keras dari semua pihak termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang untuk tetap terus berusaha mempertahankan Ideologi negara kita yaitu Pancasila.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu terus memperkuat wawasan kebangsaan dan bela negara masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai empat pilar Kebangsaan.

➤ Politik

Tingkat partisipasi masyarakat Kab. Sidenreng Rappang terhadap pemilihan kepala daerah sudah meningkat, hal ini akan terus di tingkatkan pada pemilu berikutnya. Akan tetapi tingkat partisipasi bukanlah satu-satunya yang menjadi tolak ukur membaiknya demokrasi bangsa kita. Aspek lain yang perlu menjadi perhatian adalah masih rendahnya cara pandang /pengetahuan masyarakat dalam berdemokrasi yang baik. Hal



ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang mudah dipengaruhi oleh berita-berita bohong atau hoaks baik secara langsung maupun melalui media-media sosial sehingga dapat menjadi potensi konflik antar sesama masyarakat.

Upaya yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah dengan terus melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, baik itu kaum marjinal, kaum perempuan, pemilih pemula, masyarakat umum maupun SDM Partai Politik.

➤ Sosial, Ekonomi dan Budaya

Adanya Potensi konflik berlatar belakang isu SARA, ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat juga menjadi tantangan tugas pelayanan Badan Kesatuan politik, dimana masyarakat kab. sidenreng rapping terdiri dari beberapa suku, ras, dan agama serta latar belakang budaya yang berbeda-beda sehingga memungkinkan terjadi gesekan-gesekan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Masih tingginya penyakit masyarakat terutama penyalahgunaan narkoba, penipuan-penipuan melalui media komunikasi dan lain-lainya juga menjadi tantangan yang cukup besar bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adanya Kebebasan berserikat dan berkumpul yang ditandai dengan maraknya pendirian organisasi kemasyarakatan juga menjadi tugas pokok bagi Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas mereka dilapangan, sehingga ormas-ormas yang bertentangan dengan asas Pancasila dan aktivitas ormas yang bertentangan dengan budaya masyarakat kab. Sidenreng Rapping yang berpotensi menimbulkan konflik dapat dengan mudah teratasi.



Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Meningkatnya Angka Kriminalitas	Berkembangnya penyakit masyarakat khususnya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, miras, judi, DII	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan belanegara
2.	Potensi timbulnya konflik SARA, Ipoleksosbud	Munculnya paham- paham radikal, separatisme dan terorisme yang mengganggu keamanan dan ketertiban	Rendahnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai pancasila
		Derasnya arus informasi/media melalui penyebaran berita bohong/hoaks	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang cara berdemokrasi yang baik
		Rendahnya pengawasan pemerintah terhadap aktifitas ormas di lapangan Keberadaan dan aktifitas ormas kurang terpantau	Aplikasi SIOrmas yang belum tersedia dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan pendirian ormas

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpilih

Tahun 2018 merupakan awal pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui pemilihan kepala daerah ditahun 2018. melalui RPJMD 2018- 2023 telah ditetapkan visi: **“Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”** dan misi sebagai berikut:

Misi 1 : Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Misi 2 : Memajukan usaha agribisnis , UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi 3 : Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.

Misi 4 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan.



Misi 5 : Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan *good governance* dan *electronic governance* .

Misi 6 : Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri.

Misi 7 : Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah merumuskan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan berdasarkan misi kepala daerah yang ke-7 yaitu ***“Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.”***

Dengan sasaran RPJMD: *“Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat.”*

Berdasarkan visi, misi dan sasaran tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas dan fungsi dalam mengupayakan agar kondisi keamanan dan kenyamanan masyarakat kab. Sidenreng Rappang tetap kondusif yang di tandai dengan menurunnya angka kriminalitas dan konflik, terciptanya hubungan yang harmonis antar umat beragama dan antar suku bangsa, adanya kebebasan dalam berserikat dan berkumpul dengan tetap mengamalkan 4 pilar kebangsaan yaitu: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bihneka Tunggal Ika. Untuk mewujudkan misi tersebut, berikut ini telahaan atas visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui penjabaran faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, sbb:



Visi: Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera.			
Misi KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor – Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif <u>Sasaran:</u> Meningkatkan Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	1. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan belanegara. 2. Kurangnya Pengawasan Pemerintah Terhadap Keberadaan Omas yang beraktivitas di wilayah Sidenreng Rappang	1. Sarana dan Prasarana dalam mendukung peningkatan pelayanan tidak memadai. 2. Belum tersedianya data terkait ormas aktif yang akurat.	1. Adanya Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang 2. Komitmen bersama dari SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik guna merealisasikan program kerja yang telah ditetapkan.

3.3 Telaahan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan perubahan rencana strategis yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, dapat disajikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan:



Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kesbangpol Provisisi	Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Faktor – Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat 2. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia di Sulsel	1. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan belanegara. 2. Kurangnya Pengawasan Pemerintah Terhadap Keberadaan Omas yang beraktivitas di wilayah Sidenreng Rappang 3. Belum tersedianya data tentang Indeks Dekorasi Indonesia Belum dapat di ukur.	1. Derasnya arus informasi /media melalui penyebaran berita bohong/ Hoaks. 2. Belum tersedianya data ormas yang akurat. 3. Kurangnya pemahaman tentang indikator-indikator dalam mengukur Indeks Demokrasi .	1. Stabilitas Keamanan daerah yang cukup kondusif. 2. Meningkatnya angka partisipasi masyarakat dalam pemilu.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tahun 2012, Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang menerbitkan Perda Kab. Sidenreng Rappang nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032. Perda ini diterbitkan dengan tujuan agar arah pembangunan di kabupaten Sidenreng Rappang memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perda tersebut terdiri atas :

1. Penataan dan penyebaran penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
3. Pembentukan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata berdasarkan potensi lokal;
4. Penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong iklim investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan;
5. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan ilmu



pengetahuan, kawasan rawan bencana alam berupa pengurangan resiko bencana geologi (bencana gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami) dan kawasan lindung lainnya dengan menetapkan fungsi utamanya adalah fungsi lindung dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya;

6. Pengembangan kawasan budidaya melalui optimalisasi fungsi kawasan dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
7. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang lestari, produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi; dan
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara.

Menelaah kebijakan di atas, disimpulkan bahwa kebijakan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:

1. Meningkatkan peran forum/pokja dalam rangka deteksi dini dan cegah dini,
2. Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat.

Dengan dilaksanakannya arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di harapkan potensi-potensi konflik sosial yang muncul akibat adanya dampak pengalihan/penggunaan lahan, penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta konflik perbatasan antar wilayah atau daerah dapat teratasi dengan baik.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaahan dari gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sasaran Jangka Menengah renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi, implikasi RTRW dan KLHS maka dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Berkembangnya penyakit masyarakat seperti narkoba, miras, dll.
3. Rendahnya pengawasan terhadap keberadaan/aktivitas ormas.
4. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang cara berdemokrasi yang baik.
5. Adanya potensi konflik yang jika tidak tertangani dapat menjadi konflik.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu: pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mendasari visi-misi kepala daerah dan identifikasi isu-isu strategis yang menjadi permasalahan di daerah melalui RPJMD Tahun 2018-2023, dapat dirumuskan tujuan : **“Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Kenyamanan Di Wilayah Kab. Sidenreng Rappang”** dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

- 1) Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi



Rencana Strategis 2018-2023
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap

Tabel T- C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng
 Rappang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan di wilayah kab. Sidrap		Persentase Angka Kriminalitas per 10.000	15,08%	14,41%	13,62%	12,86%	12,12%	
		1.	Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Persentase Penyelesaian Konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	100%	100%	100%	100%	100%
		2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	83,60%	-	-	-	84,30%



BAB V **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan selama lima tahun kedepan sebagai berikut:



Rencana Strategis 2018-2023
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi
dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera							
MISI 7 : Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Kenyamanan diwilayah kab. Sidrap	1. Menguatnya Persatuan dan Kesatuan Masyarakat.	Memantapkan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan memperkuat 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI)	1. Meningkatkan peran Forum/Pokja dalam rangka deteksi dini dan cegah dini. 2. Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat. 3. Mengoptimalkan Pengawasan dan Pemberdayaan Ormas.	Meningkatkan peran Forum/Pokja dalam rangka deteksi dini dan cegah dini. Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat. Mengoptimalkan Pengawasan dan Pemberdayaan Ormas.	Meningkatkan rangka deteksi dini dan cegah dini. Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat. Mengoptimalkan Pengawasan dan Pemberdayaan Ormas.	Meningkatkann rangka deteksi dini dan cegah dini. Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat. Mengoptimalkan Pengawasan dan Pemberdayaan Ormas.	Meningkatkan rangka deteksi dini dan cegah dini. Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat. Mengoptimalkan Pengawasan dan Pemberdayaan Ormas.
	2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi.	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Politik	1. Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik.	Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik.	Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik.	Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik.	Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat terakomodir di tahun 2019-2023 adalah sebanyak 6 program dan 11 kegiatan, adapun rinciannya sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Realisasi kinerja SKPD
b)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
c)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
d)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
e)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
a)	Penyediaan Komponen instalasi Listrik /Penerangan Bagunan Kantor
b)	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan
c)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasian Konsultasi SKPD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a)	Penyediaan Jasa Surat menyurat



b) Penyediaan Jasa Komunikasai , Sumber Daya Air dan Listrik
c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b) Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c) Pemeliharaan / Rehabilitas sarana dan Prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya
d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan
1. Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
5) Pelaksanaan Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
III. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
IV. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah



2) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah
V. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
VI. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah
2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara ;Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan ,serta Penanganan Konflik Daerah.
4) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
5) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen , Pemantauan Orang Asing , Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing ,Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan ,serta penanganan

Uraian program dan kegiatan pada tahun 2019-2020 dapat diuraikan pada tabel berikut:



Rencana Strategis 2018-2023
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Siak

			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kerja di bidang wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa dan pembauran						1 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000				
			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	420 org	165.000.000				260 Orang	77.050.000	260 Orang	390 orang	81.000.000				
		Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Penyuluhan Bela Negara						200 Orang	200 Orang	200 Orang								
		Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Perubahan Pola Pikir, Cara Kerja dan Cara Hidup						50 Orang	50 Orang	50 Orang								
		Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Pembauran Kebangsaan		198 org	100.299.000	150 org	50.000.000	150 Orang	150 Orang	260 orang								
			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Koordinasi di Bidang Pembauran Kebangsaan						1 Laporan		2 Laporan	2 kali	15.000.000				



Rencana Strategis 2018-2023
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap

			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Monitoring di Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran					4 Laporan		15 kali		15 kali	10.000.000				
			PROGRAM Peningkatan Peran artai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat dan sumber daya manusia partai politik yang mendapatkan pendidikan politik			98.980.000	41.300.000	967.732.252			884.900.000		885.300.000				
			KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Presentase masyarakat dan partai politik yang mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemuda			98.980.000	41.300.000	967.732.252			884.900.000		885.300.000				



Rencana Strategis 2018-2023
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap

			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi LPJ Parpol													
			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Masyarakat yang mengikuti pendidikan politik bagi pemilih pemula													
			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik													



Rencana Strategis 2018-2023
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidoarjo

			Jumlah Dokumen LPJ Bantuan Keuangan Parpol		11 dokumen					11 dokumen		11 dokumen					
			PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Pengawasan	Persentase Organisasi Masyarakat dan masyarakat Yang Diberdayakan	100%	26.990.000	100%	49.300.000	100%	133.200.000	100%	91.622.000	87%	92.000.000			
			KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat	100%	26.990.000	100%	49.300.000	100%	133.200.000	100%	91.622.000	87%	92.000.000			
			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan	100 orang	26.990.000	130 orang	43.000.000	130 Orang	44.238.000	130 Orang	41.902.000	130 Orang	42.000.000			
			Pelaksanaan Monitirong Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	Jumlah Ormas			75 ormas	6.300.000	80 Ormas	88.962.000	85 Ormas	49.720.000	85 Ormas	50.000.000			
			PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		48.564.000		-	90%	101.790.000	90%	783.948.000	90%	794.000.000			



Rencana Strategis 2018-2023
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap

			KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya			48.564.000	-	90%	101.790.000	90%	783.948.000	90%	794.000.000				
			SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan					
			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah pelajar dan masyarakat yang mendapatkan penyuluhan tentang narkotika dan prekursor					260 Orang		260 Orang		260 Orang					
				Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama		30 orang	48.564.000		550 Orang	78.790.000	550 Orang	783.948.000	550 Orang	784.000.000				
			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Koordinasi di bidang fasilitas kerukunan umat beragam					3 Laporan	23.000.000	3 Laporan		3 Laporan					



Rencana Strategis 2018-2023
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap

			Jumlah Koordinasi fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah						3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan				
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah monitoring bidang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba dan fasilitas kerukunan umat beragama					5 kali		5 kali		5 kali	10.000.000			
			PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentasi koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah	100%	587.592.000	100%	683.473.000	100%	115.297.000	100%	770.701.000	100%	831.300.000			
			KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persentase peningkatan kewaspadaan nasional, peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100%	587.592.000	100%	683.473.000	100%	115.297.000	100%	770.701.000	100%	831.300.000			



Rencana Strategis 2018-2023
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap

			SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan kerja di bidang FKDD, pemantauan orang asing dan penanganan konflik di daerah						12 Lapor an		3 Lapor an		3 Laporan	10.000.000				
			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah masyarakat yang mendapatka penyuluhan penanganan konflik di daerah						120 Orang		390 Orang	88.670.000	390 Orang	89.000.000				
			SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang	Jumlah laporan kewaspadaan dini						11 laporan	120.391.000	12 lapora n	68.100.000	12 Lapor an	115.297.000	12 Lapor an	55.286.000	12 Laporan	55.300.000



Rencana Strategis 2018-2023
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidoarjo

		Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah laporan pemantauan orang asing						12 Laporan	-	2 Laporan		2 Laporan				
			Jumlah pemantauan orang asing						24 Laporan	-	2 kali		2 kali				
		SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah pemantauan pengendalian penyakit masyarakat		6 kali				4 Laporan		4 kali		4 kali				
			Jumlah pengawasan orang asing						12 Laporan		12 Laporan	50.000.000	12 Laporan				
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi forum pimpinan daerah kabupaten/kota		12 bln	467.201.000	12 bln	615.373.000	12 bulan	616.255.000	12 bulan	626.745.000	12 bulan	627.000.000			
		PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	2.039.549.000	100%	2.480.247.500	100%	2.780.355.748	100%	2.690.202.357	100%	2.755.457.416			
		KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah		100%	26.688.000	100%	11.850.000	100%	17.299.800	100%	12.000.000	100%	12.000.000			



Rencana Strategis 2018-2023
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap

		SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 laporan	26.688.000	4 laporan	11.850.000	4 laporan	17.299.800	2 laporan	2.000.000	2 laporan	2.000.000			
		SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang dihasilkan								1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000			
		SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan								2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000			
		SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang dihasilkan								1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000			
		SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Dpa Perubahan yang dihasilkan								2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000			
		KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	1.555.452.000	100%	1.996.719.500	100%	2.166.155.948	100%	2.180.831.357	100%	2.202.582.000			
		SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN		14 Bulan	1.480.804.000	14 Bulan	1.986.714.000	14 Bulan	2.152.540.948	14 Bulan	2.176.566.357	14 Bulan	2.198.332.000			9.994.957.305
		SUB KEGIATAN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan		12 bulan	74.648.000	12bulan	9.405.500	12 bulan	12.877.000					36 bulan		96.930.500
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan								4 Laporan	3.520.000	4 Laporan	3.500.000	8 laporan		7.020.000



Rencana Strategis 2018-2023
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap

			SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun			1 laporan	600.000	1 laporan	738.000	1 laporan	745.000	1 laporan	750.000	4 laporan	2.833.000		
			KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	112.292.000	100%	102.490.000	100%	132.730.000	100%	94.520.000	100%	94.820.000				
			SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	61 Buah	2.452.000	34 buah	2.320.000	70 buah	2.600.000	68 Buah	2.000.000	70 Buah	2.000.000				
			SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 eksamp ^l	3.840.000	24 eksa ^m pl ^{er}	2.520.000			36 eksa ^m pl ^{er}	2.520.000	36 eksa ^m pl ^{er}	2.520.000				
			SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34 kali	100.000.000	25 Kali	90.000.000	155 kali	130.130.000	155 kali	90.000.000	155 kali	90.300.000				
				Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	55 kali	6.000.000	57 Kali	7.650.000							70 kali	70 kali	70 kali	
			KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	18.000.000	100%	7.000.000	100%	64.082.000	100%	83.583.000	100%	75.255.416				
			SUB KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	30 bUah	18.000.000	1 unit	7.000.000	60 buah	64.082.000	60 buah	83.583.000	60 buah	75.255.416				
				jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	3 buah		3 unit	17.000.000	8 unit		8 unit		8 unit					
			KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	236.530.000	100%	266.352.000	100%	294.458.000	100%	169.480.000	100%	170.300.000				



Rencana Strategis 2018-2023
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap

			SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen Bermaterai	220 Lembar	1.110.000	250 lembar	1.200.000	260 Lembar	1.750.000	260 Lembar	2.200.000	260 Lembar	2.000.000				
			SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	18.000.000	12 bulan	24.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	36.000.000				
			SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	21.628.000	12 bulan	21.600.000	12 bulan	256.708.000	12 bulan	131.280.000	12 bulan	132.300.000				
				Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	195.792.000	12 bulan	219.552.000	12 bulan		12 bulan		12 bulan					
			KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	90.587.000	100%	95.836.000	100%	105.630.000	100%	149.788.000	100%	200.500.000				
			SUB KEGIATAN Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin / berkala	12 Unit	71.904.000	10 unit	71.120.000	15 unit	69.778.000	12 unit	97.700.000	12 unit	98.000.000				
			SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	12 Unit	4.645.000	10 unit	4.791.000	15 unit	6.264.000	15 unit	12.400.000	15 unit	12.500.000				
			SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	jumlah dan jenis peralatan yang dipelihara rutin/berkala	6 Unitt	3.000.000	6 unit	3.000.000	10 unit	29.588.000	12 unit	39.688.000	12 unit	40.000.000				



Rencana Strategis 2018-2023
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap

			jumlah daab jenis perlengkapan yang dipelihara rutin/berkala		5 Unit	1.750.000	10 unit	3.500.000	15 unit		15 unit						
		SUB KEGIATAN Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah atau luasan yang direhabilitasi sedang/Berat						1 unit		1 unit		1 unit				
			jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		1 Unit	9.288.000	1 unit	13.425.000	1 unit		1 unit		1 unit	50.000.000			



Tabel. 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Tahun 2021-2023 Kabupaten Sidenreng
Rappang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2019		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan kenyamanan di wilayah Kab. Sidenreng Rappang	Meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan Pelayanan Administrasi Penunjang Urusan pemerintahan			100 %	2.780.355.748	100 %	2.690.202.357	100 %	2.757.457.416		
			Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah			100 %	17.299.800	100 %	12.000.000	100 %	12.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	17.299.800	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang dihasilkan			-	-	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang dihasilkan			-	-	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang dihasilkan			-	-	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang dihasilkan			-	-	2 dokumen	3.000.000	2 dokumen	3.000.000		



Rencana Strategis 2018-2023
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan			100 %	2.166.155.948	100 %	2.180.831.357	100 %	2.202.582.000		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan			14 Bulan	2.152.540.948	14 Bulan	2.176.566.357	14 Bulan	2.198.332.000		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan			12 Bulan	12.877.000						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an	Jumlah Koorinasi dan Pelaporan Keuangan					4 Laporan	3.520.000	4 Laporan	3.500.000		
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	738.000	1 Laporan	745.000	1 Laporan	750.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum			100 %	132.730.000	100 %	94.520.000	100 %	94.820.000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /penerangan Bangunan			70 buah	2.600.000	75 buah	2.000.000	75 buah	2.000.000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan			-	-	24 eksamp lar	2.520.000	24 eksa mpla r	2.520.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			70 Kali	109.230.000	75 Kali	90.000.000	80 Kali	90.300.000		
	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah			155 Kali	20.900.000	170 Kali		180 Kali			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah				84.082.000		83.583.000		75.255.416		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang di adakan			50 buah	42.623.000	40 buah	83.583.000	40 buah	75.255.416		
	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang diadakan			8 Unit	41.459.000	10 Unit		10 unit			



Rencana Strategis 2018-2023
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediann Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				294.458.000			169.480.000		172.300.000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai			260 Lembar	1.750.000		260 lembar	2.200.000	260 lembar	2.000.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dayan Air dan Listrik			12 Bulan	36.000.000		12 Bulan	36.000.000	12 Bulan	38.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			12 Bulan	26.986.000		12 Bulan	131.280.000	12 Bulan	132.300.000		
	Waktu Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			12 Bulan	229.722.000		12 Bulan		12 Bulan			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah				85.630.000			149.788.000		200.500.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin / berkala			15 unit	69.778.000		15 unit	97.700.000	15 unit	98.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeiharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan			15 unit	6.264.000		15 unit	12.400.000	15 unit	12.500.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor yang dipelihara rutin/berkala			15 unit	2.352.000		15 unit	39.688.000	15 unit	40.000.000		
	jumlah dan jenis peralatan yang dipelihara Rutin/Berkala			10 Unit	7.236.000		11 unit		12 unit			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan	jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin								1 unit	50.000.000		



Rencana Strategis 2018-2023
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap

Lainnya	Jumlah atau luasan kantor yang direhabilitasi sedang/berat							2 Unit			
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat Yang mendapatkan Pembinaan/ Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa		0,23 %	77.050.000	0,24 %	80.971.000	0,25 %	116.000.000			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Capaian Masyarakat yang mendapatkan pembinaan penyuluhan ideologi pancasila dan karakter bangsa		0,23 %	77.050.000	0,24 %	80.971.000	0,25 %	116.000.000			
Penyusunan Program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kerja di bidang wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa dan pembauran		1 Laporan	850.000			4 laporan	10.000.000			
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan		260 orang	15.000.000	390 orang	15.000.000	390 orang	15.000.000			
	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Penyuluhan Bela Negara		200 orang	15.000.000	200 orang	15.971.000	200 orang	15.000.000			
	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Perubahan Pola PIKIR, Cara Kerja dan Cara Hidup		50 Orang	10.000.000	50 Orang	25.000.000	50 Orang	26.000.000			
	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Pembauran Kebangsaan		150 orang	15.000.000	260 orang	25.000.000	260 orang	25.000.000			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Koordinasi di Bidang Pembauran Kebangsaan		1 laporan	600.000			2 kali	15.000.000			



Rencana Strategis 2018-2023
Badan Kasatukan Bangsa & Politik Kab. Sidrap

Pelaksanaan Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Monitoring di Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran			4 Laporan	20.600.000			15 kali	10.000.000		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat dan sumber daya manusia partai politik yang mendapatkan pendidikan politik			0,09 %	967.732.252			0,10 %	885.300.000		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase masyarakat dan partai politik yang mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula				967.732.252				885.300.000		
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi LPJ Parpol			44 orang	119.793.000						
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Masyarakat yang mengikuti pendidikan politik bagi pemilih			130 orang	98.941.000			110 orang	847.000.000		



Rencana Strategis 2018-2023
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Siak

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Laporan Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik			12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
	Jumlah Dokumen LPJ Bantuan Keuangan Parpol			11 dokumen	748.998.252	11 dokumen	38.230.000	11 dokumen	38.300.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat dan masyarakat Yang Diberdayakan			84 %	133.200.000	87 %	91.622.000	90 %	92.000.000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Peaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat				133.200.000		91.622.000		92.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan			130 orang	44.238.000	130 orang	41.902.000	130 orang	42.000.000	
pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas			80 ormas	88.962.000	80 ormas	49.720.000	80 ormas	50.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya			0,23 %	101.790.000	0,24 %	783.948.000	0,24 %	794.000.000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya				101.790.000		783.948.000		794.000.000	



Rencana Strategis 2018-2023
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			2 Laporan	5.360.000					
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah pelajar dan masyarakat yang mendapatkan penyuluhan tentang narkotika dan prekursor			550 orang	20.000.000	550 orang	783.948.000	550 orang	784.000.000	
	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama			130 orang	18.046.000	260 orang		260 orang		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Koordinasi di bidang fasilitas kerukunan umat beragam			3 Laporan	5.941.000					
	Jumlah Koordinasi fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah			3 Laporan	11.000.000					
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah monitoring bidang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika dan fasilitas kerukunan umat beragama			12 laporan	41.443.000			5 Kali	10.000.000	



Rencana Strategis 2018-2023
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentasi koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah			100 %	731.552.000	100 %	1.268.275.000	100 %	831.300.000		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penangan Konflik	persentase peningkatan kewaspadaan nasional, peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial				731.552.000		1.268.275.000		831.300.000		
Penyusunan Program di Bidang Kewaspadaan Dini, KerjaSama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan kerja di bidang FKDD, pemantauan orang asing dan penanganan konflik di daerah			12 Laporan	1.652.000	3 Laporan		3 Laporan	10.000.000		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, KerjaSama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah masyarakat yang mendapatka penyuluhan penanganan konflik di daerah			120 orang	45.000.000	390 orang	88.670.000	390 orang	89.000.000		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, KerjaSama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan kewaspadaan dini			12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	552.860.000	12 Laporan	55.300.000		
	jumlah laporan pemantauan orang asing			12 Laporan	10.000.000	12 Laporan		12 Laporan			
	Jumlah pemantauan orang asing			24 Laporan	16.300.000	24 Laporan		24 Laporan			



Rencana Strategis 2018-2023
Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Sidrap

		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah pemantauan pengendalian penyakit masyarakat			24 Laporan	16.300.000	2 Kali		2 kali		
			Jumlah pengawasan orang asing			24 Laporan	16.300.000	12 Laporan		12 Laporan	50.000.000	
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi forum pimpinan daerah kabupaten/ kota			12 laporan	616.000.000	12 Laporan	626.745.000	12 laporan	627.000.000	
Jumlah							4.791.680.000		5.799.918.357		5.476.057.416	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat di tampilkan dalam tabel berikut:

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampillkandalam tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.



Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	angka kriminalitas	457 kasus	450 kasus	435 kasus	420 kasus	405 kasus	385 kasus	385 kasus
2	% pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
3	Jumlah konflik SARA, Sosial, Budaya dan ekonomi di masyarakat	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
4	% ormas yang bertentangan dengan asas Pancasila	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
5	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/pemilukada	80,26 %	82,63 %	%	%	%	%	%

Note: Jumlah Penduduk:



Tabel . 7.1.
Keselarasan RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

NO	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Indikator Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah					Kondisi Kinerja Pada Akhirnya Perubahan Renstra
								2019	2020	2021	2022	2023		
	Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang maju dengan masyarakat religius, aman, adil dan sejahtera	Terciptanya stabilitas keamanan dan kenyamanan di wilayah kab. Sidrap	meningkatnya kenyamanan kehidupan bermasyarakat	Menguatnya persatuan dan kesatuan bangsa	Terciptanya stabilitas keamanan dan kenyamanan di wilayah kab. Sidrap	meningkatnya kenyamanan kehidupan bermasyarakat	Persentase Angka Kriminalitas per 10.000	15,08%	14,41%	13,62%	12,86%	12,12%	12,12%	
							Persentase Penyelesaian Konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
							Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pemilu	83,60%	-	-	-	-	-	



Tabel. 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir Perubahan Renstra
			2019	2020	2021	2022	2023		
	Urusan								
1	Persentase Angka Kriminalitas per 10.000		15,08%	14,41%	13,62%	12,86%	12,12%	12,12%	
2	Persentase Penyelesaian Konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	$\frac{\text{Jumlah konflik yang tertangani}}{\text{Jumlah Konflik}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pemilu	$\frac{\text{Jumlah Pengguna Hak Pilih}}{\text{Jumlah DPT}} \times 100 \%$	83,60%	-	-	-	-	-	



Tabel. 7.3
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Kunci	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir Perubahan Renstra
			2019	2020	2021	2022	2023		
	Urusan								
1	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan/penyuluhan ideologi pancasila dan karakter bangsa	Jumlah masyarakat usia 17-45 tahun yang mendapat penyuluhan wawasan kebangsaan dibagi jumlah masyarakat usia 17-45 tahun dikali 100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
2	Persentase masyarakat dan sumber daya manusia partai politik yang mendapatkan pendidikan politik	Jumlah Pemilih pemula dan pengurus parpol yang mendapat pendidikan politik dibagi total pemilih pemula dan pengurus parpol dikali 100%	80%	80%	80%	85%	90%	90%	90%
3	persentase organisasi masyarakat dan masyarakat yang diberdayakan	Jumlah ormas dan masyarakat yang diberdayakan dibagi total ormas dikali 100%	100%	100%	84%	87%	90%	90%	90%
4	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	jumlah masyarakat usia 17-45 tahun yang mendapatkan pembinaan/ penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba dibagi jumlah masyarakat usia 17-45 tahun dikali 100%			90%	90%	90%	90%	90%
5	Persentase koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah	Jumlah koordinasi cegah dan deteksi dini konflik daerah di bagi jumlah koordinasi yang ditargetkan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan rangkaian kegiatan pembangunan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Demikian Renstra Perangkat Daerah ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman oleh Kepala Perangkat Daerah beserta staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, 26 Agustus 2021
Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik

INDAH SAID ROEM, SE., M.A.P

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP :19640610 199307 2 002